

The Determinant of Financial Statements-Content Information: *Corporate Governance* as a Mediating Variable

Siti Nurohmi

Sutrisno

Zaki Baridwan

Universitas Brawijaya, Malang

Abstract: This study aimed to examine the effect of human resource capacity, internal control, utilization of information technology and corporate governance of the financial statement information. Retrieving data using a survey method. The sample in this study is the head of the bureau, division chief, section chief, head of the sub-division and the administrative manager of financial spread in the working area of Perum Jasa Tirta I is Brantas River and Bengawan Solo. A total of 148 data processed using smartPLS. The results of this study indicate that the capacity of human resources and internal control affecting corporate governance, in addition to the capacity of human resources and corporate governance affects the financial statements information directly. The implication of this study is the management of Perum Jasa Tirta I must ensure that the human resources that exist in the company are resources that are competent and have sufficient internal control, so as to improve the implementation of corporate governance and financial reporting information delivered in a timely manner.

Keywords: determinants of financial statements information, corporate governance.

Abstrak : Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan corporate governance terhadap informasi laporan keuangan. Pengambilan data menggunakan metode survey. Sampel dalam studi ini adalah kepala biro, kepala divisi, kepala bagian, kepala sub divisi dan pengelola administrasi keuangan yang tersebar di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I yaitu Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Sebanyak 148 data diolah dengan menggunakan smartPLS. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern mempengaruhi corporate governance, selain itu kapasitas sumber daya manusia dan corporate governance mempengaruhi informasi laporan keuangan secara langsung. Implikasi studi ini adalah manajemen Perum Jasa Tirta I harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada pada perusahaan merupakan sumber daya yang berkompeten dan memiliki pengendalian intern yang memadai, sehingga dapat meningkatkan penerapan corporate governance dan menyampaikan informasi laporan keuangan secara tepat waktu.

Kata Kunci : Determinan informasi laporan keuangan, corporate governance.

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Keberadaan laporan keuangan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan dan menjadi sebuah informasi yang dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, akuntabilitas laporan keuangan merupakan perwujudan kewajiban organ BUMN guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam pengelolaan perusahaan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ruang lingkup Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN adalah rangkaian proses perusahaan dimulai dari perencanaan, pelaporan, evaluasi dan monitoring. Akuntabilitas laporan keuangan BUMN dalam kegiatan perencanaan terdapat pada penyusunan dan pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan penetapan Indikator Pencapaian Kinerja (KPI). Akuntabilitas dalam kegiatan monitoring terdiri atas pengawasan intern, manajemen risiko, dan pelaporan berkala. Sedangkan yang termasuk akuntabilitas dalam kegiatan evaluasi antara lain adalah penyampaian laporan tahunan (Buletin Kementerian BUMN, 2012).

Upaya pemerintah mewujudkan akuntabilitas keuangan yaitu setiap kegiatan BUMN dalam pengelolaan perusahaan diwajibkan menerapkan *Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut meliputi: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Kemajuan pengelolaan BUMN terlihat dari pertumbuhan total pendapatan dan total aset seluruh BUMN tahun 2004 sampai 2007. Pada tahun 2005 pendapatan seluruh BUMN terjadi peningkatan 20%, sedangkan pada tahun 2006 ke 2007 total pendapatan meningkat sebesar 14% dari 763 triliun menjadi 889 triliun. Total aset tahun 2004 seluruh BUMN sebesar Rp 1.247 triliun, kemudian meningkat 9% menjadi Rp 1.366 triliun pada tahun 2005, meningkat 9% menjadi Rp 1.506 pada tahun 2006, dan meningkat 12% menjadi Rp 1.719 pada tahun 2007 (Anwar, 2012). Kemajuan pengelolaan BUMN secara menyeluruh telah terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. Kemajuan tersebut belum bisa diimbangi dengan kemajuan dalam hal penyampaian laporan keuangan, karena bila dicermati lebih dalam masih terjadi penyusunan laporan keuangan yang tidak berdasar pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Menurut Sri Mulyani (Republika On Line, 2010) menyatakan bahwa masih sedikit BUMN yang memiliki laporan keuangan yang baik.

Dalam hal aturan penyampaian laporan keuangan BUMN telah diterbitkan PMK Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 mengatur kewajiban BUMN menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Negara BUMN *unaudited* maksimal 15 Februari tahun berikutnya, dan laporan keuangan *audited* maksimal 15 Mei tahun berikutnya. Keterlambatan pelaporan keuangan merupakan masalah serius pada BUMN di Indonesia.

Pada tahun 2008 beberapa BUMN terlambat menyerahkan laporan keuangan dari waktu yang telah ditetapkan. Hanya 95 BUMN (67,61%) yang menyerahkan laporan keuangan tahun 2008 (*unaudited*) sampai dengan 15 April 2009. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi permasalahan yang terjadi antara pemilik modal sebagai *principal* dengan manajemen sebagai *agent*. Permasalahan terjadi karena *agent* memiliki lebih banyak informasi dari pada *principal*, kondisi ini mencerminkan terjadinya asimetri informasi.

Menurut teori sinyal Morris (1987) asimetri informasi dapat dikurangi ketika pihak yang memiliki lebih banyak informasi menyampaikan informasi yang dimiliki melalui sinyal tertentu. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* secara konsisten dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemilik modal dengan manajemen, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menghambat aktivitas rekayasa laporan keuangan (Kaihatu, 2006). Setiap BUMN diwajibkan untuk menerapkan *corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan sesuai peraturan menteri negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi keuangan tersebut di atas, dapat dihilangkan atau diminimalisir melalui penerapan *corporate governance* yang didukung dengan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance* beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: kapasitas sumber daya manusia harus ditingkatkan karena sumber daya manusia berhubungan langsung dengan sistem informasi akuntansi. Manajemen dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kedua, dalam rangka penerapan *corporate governance* perusahaan menyusun pedoman *corporate governance* diantaranya sistem pengendalian intern. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.

Sebanyak 63 kasus ketidakpatuhan perundang-undangan ditemukan di BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 2,5 triliun (semester I tahun 2012). Hasil temuan menunjukkan adanya beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian intern, salah satunya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi pada beberapa perusahaan di lingkungan BUMN masih lemah, hal ini diyakini akan berpengaruh terhadap kewajiban penerapan *corporate governance* pada BUMN sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha suatu perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur di BUMN guna mendukung strategi bisnis BUMN sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang ingin dicapai BUMN. Teknologi informasi disusun untuk periode tiga sampai dengan lima tahun dan diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), untuk jangka pendek teknologi informasi diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

BUMN berkewajiban untuk mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. Proses *IT governance* dapat terealisasi jika ada peran aktif direksi dan manajemen puncak BUMN. Hal ini sesuai pengertian *IT Governance* yaitu tata kelola menjadi tanggung jawab direksi dan manajemen. Secara eksternal, perusahaan dapat memenuhi tujuan *stakeholder* yang menginginkan proses transparan dalam pengelolaan perusahaan khususnya aspek pelaporan keuangan. Secara internal dapat menjalankan proses bisnis secara akurat, efisien dan efektif, sesuai dengan strategi bisnis (Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013).

Penerapan sistem informasi akuntansi dipengaruhi faktor individu dan sistem. Faktor individu yaitu manusia yang mengaplikasikan sistem informasi akuntansi. Faktor individu seperti rasa ingin tahu, motivasi, suka dan tidak suka, berpengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi (Larsen, 2003). Hasil penelitian Khomsiah (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang mengaplikasikan *corporate governance* mengungkapkan lebih banyak informasi dan dapat meminimalisir asimetri informasi. Hasil penelitian Manek (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap

penerapan *corporate governance*. Artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat keberhasilan penerapan *corporate governance*. Pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap *corporate governance* dan informasi laporan keuangan dengan mediasi *corporate governance*.

Studi ini merupakan pengembangan atas penelitian yang dilakukan Manek (2012). Penelitian Manek (2012) menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap *corporate governance*. Hasil penelitian Manek (2012) menyatakan *corporate governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi. *Corporate governance* berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan melalui *corporate governance*. Perbedaan penelitian Manek (2012) dengan penelitian ini terletak pada variabel intervening yang diuji. Penelitian Manek (2012) menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi laporan keuangan melalui variabel intervening *corporate governance*. Penelitian ini menguji pengaruh langsung kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap informasi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang didukung dengan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan lebih banyak informasi laporan keuangan, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Semakin efektif penerapan *corporate governance* oleh perusahaan semakin banyak informasi yang diungkapkan. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan berdasarkan azas *corporate governance* sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance* dan informasi laporan keuangan yang dilakukan pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Malang.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Menurut Eisenhardt (1989) teori agensi banyak dipakai sebagai dasar teori yang menjelaskan penelitian di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, ilmu politik, perilaku organisasi, dan sosiologi. Teori agensi dilandasi atas tiga asumsi penting yaitu : asumsi sifat manusia, keorganisasian, dan informasi. Teori agensi lebih menekankan pada pengaturan kontrak yang efisien antara pemilik modal dengan manajemen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi permasalahan yang terjadi antara pemilik modal sebagai *principal* dan manajemen/*agent*. Masalah agensi (*agency problem*) timbul karena adanya pemisahan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan (*agent*) serta manusia cenderung memiliki sifat *self-interest*. Semua pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan ini selalu berusaha mendapatkan utilitas yang maksimal. Jika *principal* dan *agent* yang terlibat dalam pemisahan fungsi tersebut memihak kepentingannya sendiri, maka terjadi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara manajer dan pemilik modal yang menimbulkan konflik. Untuk mengurangi konflik tersebut diperlukan biaya yang disebut dengan biaya agensi (*agency cost*). Ada tiga macam biaya agensi yaitu *monitoring* yang didesign untuk membatasi penyimpangan aktivitas oleh agen, biaya pengikatan (*bonding cost*) yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan yang merugikan prinsipal, dan *residual loss* yang timbul bila terjadi perbedaan antara keputusan agen dengan keputusan yang dapat memaksimumkan kemakmuran prinsipal.

Teori Sinyal

Teorisinyal (*signalling theory*) mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajer dalam merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi, perolehan laba atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Menurut teori sinyal (Morris, 1987) asimetri informasi bisa dikurangi ketika pihak yang memiliki lebih banyak informasi menyampaikan informasi yang dimilikinya melalui sinyal tertentu. Asimetri informasi menggambarkan bahwa pihak dalam perusahaan, seperti manajemen umumnya memiliki informasi lebih lengkap tentang kondisi perusahaan, rencana-rencana perusahaan, dan prospek

masa depan perusahaan dibandingkan pihak di luar perusahaan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Melalui teori sinyal, asimetri informasi dapat dikurangi dengan informasi laporan keuangan yang berkualitas yang didukung dengan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi yang baik.

Informasi Laporan Keuangan

Informasi laporan keuangan adalah semua informasi yang digunakan untuk fungsi keuangan. Menurut Bodnar dan Hopwood (2010) informasi ini dihasilkan oleh sistem informasi laporan keuangan yang merupakan sub sistem dari sistem informasi manajemen yang khusus menghasilkan informasi untuk fungsi keuangan. Informasi laporan keuangan lebih luas dari informasi akuntansi. Menurut Bodnar dan Hopwood (2010) informasi akuntansi merupakan informasi yang diperoleh dari aplikasi sistem akuntansi, sedangkan informasi laporan keuangan selain berasal dari aplikasi sistem akuntansi juga berasal dari lingkungan. Contoh informasi laporan keuangan yang berasal dari aplikasi sistem akuntansi adalah laporan arus kas, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan laba rugi komprehensif, sedangkan informasi laporan keuangan yang berasal dari lingkungan, misalnya informasi tentang tingkat bunga, *lender profiles*, dan informasi tentang pasar kredit.

Laporan keuangan merupakan penyajian posisi kinerja keuangan dan kinerja manajemen dalam perusahaan. Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk memberi informasi tentang posisi, kinerja, dan arus kas entitas yang nantinya akan dimanfaatkan oleh berbagai pengguna untuk keperluan pengambilan keputusan. Laporan keuangan mencerminkan tanggungjawab manajemen atas penggunaan sumber daya (Ikatan Akuntan Indonesia; 2012:1). Menurut Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor 23/PMK.01/2007 dan PER-04/MBU/2007, Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara dalam satu periode. Laporan keuangan lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:1.4) terdiri dari laporan : posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (kebermanfaatannya keputusan). Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut menambah pengetahuan pembuat keputusan, meningkatkan keyakinan dan dapat mengubah sikap dan perilaku pengguna. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus berkualitas.

Menurut Suwardjono (2011) kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi akuntansi adalah : 1) kualitas primer terdiri dari keberpautan (*Relevance*) dan keterandalan (*Reliability*), 2) kualitas sekunder terdiri dari Keterbandingan (*Comparability*), Ketaatasaan atau Konsistensi (*Consistency*), dan Kenetralan atau netralitas (*Neutrality*). Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Faktor-faktor yang memengaruhi Informasi Laporan Keuangan.

Teori yang melandasi setiap variabel independen yang digunakan sebagai prediktor informasi laporan keuangan. Berdasar pada tujuan penelitian maka variabel-variabel yang dibahas pada sub ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan *good corporate governance*.

Tata kelola perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan merupakan suatu mekanisme atau prosedur yang digunakan untuk *monitoring* perilaku manajer. Menurut Kanagaretnam, Lobo and Whalen (2007) tata kelola perusahaan mencakup pengendalian dan prosedur yang ada untuk menjamin bahwa tindakan manajemen memihak kepentingan pemegang saham. Selain itu mengurangi kemungkinan manajemen bertindak untuk kepentingan sendiri dan mengambil tindakan yang menyimpang dari usaha yang memaksimalkan nilai perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan juga dapat memengaruhi informasi yang disampaikan perusahaan kepada pemegang saham. Mekanisme ini dapat mengurangi kemungkinan manajemen bertindak untuk kepentingannya sendiri, mengungkapkan informasi laporan keuangan yang tidak lengkap pada pemegang saham, atau informasi yang kurang kredibel. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan bukan hanya berkaitan dengan *monitoring* perilaku manajer, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan mengungkapkan informasi laporan keuangan.

Praktek terbaik dari penerapan tata kelola perusahaan disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Konsep ini menyatakan pemilik modal memerlukan informasi yang benar dan tepat waktu, perusahaan melakukan pengungkapan dengan tepat waktu, dan transparan (Kaihatu, 2006).

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) bagi perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Maju mundurnya perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Bahkan daya saing perusahaan sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yang andal. Sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran sumbangannya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang baik pula (Irawan, 2000).

Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan rencana organisasi, metode, dan pengukuran yang telah ditetapkan untuk membuat harta kekayaan menjadi terlindungi, operasional menjadi efisien, dan kebijakan manajerial semakin dipatuhi (Diana dan Setiawati, 2011:82). Definisi menurut Institute of Internal Auditors (IIA) di dalam *Standar and Guideline for The Profesional Practice of Internal Auditing* menyatakan bahwa pengendalian intern adalah aktivitas yang berusaha untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

COSO (the Committee of Sponsoring Organizations) adalah sekelompok swasta yang terdiri dari American Accounting Associations, the AICPA, the Institute of Internal auditors, the Institute of manajement Accountants, dan the Financial Executives Institute, pada tahun 1992, mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan tersebut meliputi: 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) reliabilitas pelaporan keuangan, dan 3) kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada (Diana dan Setiawati, 2011:82-83).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung proses implementasi *corporate governance* BUMN diwajibkan menyampaikan informasi laporan tahunan dan laporan keuangan. Informasi baik bila perusahaan memanfaatkan teknologi informasi berupa *hardware, software, database, internet, intranet, e-commerce* (Wilkinson *et al.*, 2000). Kelemahan sistem komputer antara lain biaya pemasangan instalasi tinggi, diperlukan kontrol yang lebih baik dan data yang disimpan mudah rusak (Mustafa, 2010).

Kerangka Konseptual

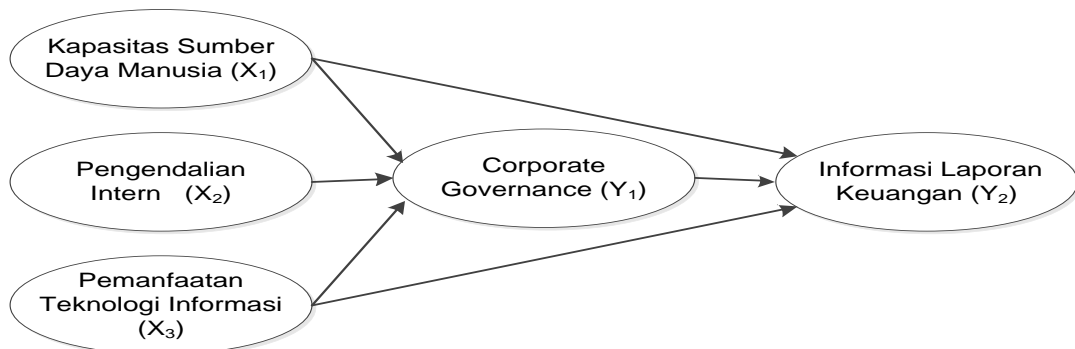
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi permasalahan yang terjadi antara pemilik modal

sebagai *principal* dengan manajemen sebagai *agent*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemilik modal untuk bekerja dan diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Teori sinyal (Morris, 1987) membahas masalah asimetri informasi yang terjadi jika salah satu pihak (manajer mempunyai informasi yang lebih banyak dari pihak lainnya/pemilik modal). Menurut prediksi teori sinyal (Morris, 1987) asimetri informasi bisa dikurangi ketika pihak yang memiliki lebih banyak informasi menyampaikan informasi yang dimiliki melalui sinyal tertentu, antara lain informasi laporan keuangan. Penelitian mengenai informasi laporan keuangan dilakukan oleh Fanani (2009), hasil studi menyatakan bahwa informasi laporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi.

Studi atas informasi laporan keuangan dimulai dari studi Alimbudiono dan Fedelis (2004). Pada studi ini, konstruk informasi laporan keuangan terdiri dari dua konstruk utama, yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan. Konstruk keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan dipengaruhi oleh tiga konstruk, yaitu kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa studi (Indrasari dan Nahartyo, 2008; Mustafa, 2010; Widianingrum dan Rahmawati, 2010; Hendra *et al.*, 2012; Lismawati, 2012; Hullah *et al.*, 2012; Hanafi, 2013; Delano dan Deviani, 2013; Sari dan Witono, 2014; Setiawati dan Sari, 2014; Dewi *et al.*, 2014; Desmiyawati, 2014;) telah melakukan manipulasi hubungan konstruk keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan keuangan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan. Tahun 2012, Manek menambahkan sebuah konstruk yaitu *corporate governance*. Begitu pula dengan Azlim *et al.* (2012), menambahkan dua konstruk yaitu *corporate governance* dan standar akuntansi pemerintahan.

Hipotesis Penelitian

Model penelitian tersebut dijelaskan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Model Penelitian

Manfaat pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip *corporate governance* adalah: 1) suasana kerja kondusif karena terbina hubungan yang harmonis baik sesama karyawan maupun karyawan dengan manajemen, 2) kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif, 3) terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan ditetapkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip keadilan, 4) meningkatkan daya saing perusahaan (Effendi, 2009:135). Penelitian Manek (2012) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman penerapan *corporate governance*, semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia semakin meningkat pemahamannya tentang *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap *corporate governance*

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai langkah perbaikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang berlatar pendidikan akuntansi (Ratnawati, 2014). Penelitian pengaruh sumber daya manusia terhadap informasi laporan keuangan yang dilakukan Hendra *et al.* (2012), Dewi *et al.* (2014) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi laporan keuangan.

Hendra *et al.* (2012) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap informasi laporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan SKPD Provinsi Aceh. Senada dengan Hendra *et al.* (2012), Dewi *et al.* (2014) juga meneliti mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap informasi laporan keuangan. Dewi *et al.* (2014) melakukan penelitian pada institusi yang berbeda, yaitu PDAM Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 2 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern (*internal control*) merupakan salah satu perwujudan dari *corporate governance* yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di perusahaan. Tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian intern dalam suatu perusahaan merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai macam tindak kecurangan

(*froud*) di lingkungan perusahaan. Hasil Penelitian Manek (2012) mengenai pengendalian intern akuntansi terbukti berpengaruh terhadap *corporate governance*. Artinya, semakin tinggi pengendalian intern akuntansi, semakin meningkatkan kinerja tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 3: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penerapan *corporate governance*

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan memberikan lebih banyak informasi. Semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan. Hal ini sama dengan hasil penelitian Manek (2012), hasil pengujian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan *corporate governance* membuktikan bahwa semakin tinggi pengungkapan laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkatkan pemahaman tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berdasarkan uraian, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan *corporate governance*

Widianingrum dan Rahmawati (2010) meneliti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Subosukawonosraten. Dalam penelitian ini, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Subosukawonosraten. Senada dengan Widianingrum dan Rahmawati(2010), Hullah *et al.* (2012), Sari dan Witono (2014) juga meneliti mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan pada institusi yang berbeda.

Berbeda dengan Prapto (2010), Delano dan Deviani (2013) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Studi Prapto (2010), Delano dan Deviani (2013) tidak mendukung informasi laporan keuangan dengan konteks studi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan. Sedangkan yang diteliti dalam studi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengungkapan informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan informasi laporan keuangan, sehingga hipotesis yang diajukan :

Hipotesis 5: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap informasi laporan keuangan

Salah satu wujud penegakan prinsip *corporate governance* adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi. Informasi terdiri dari informasi keuangan dan non keuangan. Informasi keuangan terdiri atas laporan : neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi non keuangan merupakan informasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan (Effendi 2009 : 104).

Penelitian tentang analisis pengaruh *corporate governance* terhadap informasi laporan dilakukan Manek (2012). Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* terbukti berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan, semakin tinggi pemahaman akan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa meningkatkan nilai informasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan informasi laporan keuangan, sehingga penulis mengajukan hipotesis :

Hipotesis 6: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap informasi laporan keuangan

METODE

Obyek dalam penelitian ini adalah Perum Jasa Tirta I Malang. Pemilihan obyek ini karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2010, Perum Jasa Tirta I merupakan salah satu BUMN di bidang pengelolaan sumber daya air. Penyampaian laporan keuangan sebagian besar BUMN di Indonesia ke kementerian BUMN mengalami keterlambatan. Menurut kementerian BUMN, sampai dengan 15 April 2009 sebanyak 32,29% BUMN terlambat menyerahkan laporan keuangan tahun 2008 (audited). Selain itu, sebagian besar BUMN di Indonesia belum bisa menyediakan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Sri Mulyani, Republika On Line 2010).

Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN diwajibkan untuk menerapkan *corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan sesuai peraturan menteri negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan *corporate governance*. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan serta penyusunan laporan keuangan belum sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku pada sebagian besar di BUMN tersebut di atas, mungkin dapat dikurangi dengan penerapan *corporate governance* yang didukung dengan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menghambat

aktivitas rekayasa laporan keuangan (Kaihatu, 2006). Unit analisisnya adalah individu yaitu Kepala Unit/Biro/Divisi, kepala Bagian/Sub Divisi dan seluruh staf yang mengelola keuangan pada wilayah kerja Perum Jasa Tirta I.

HASIL dan PEMBAHASAN

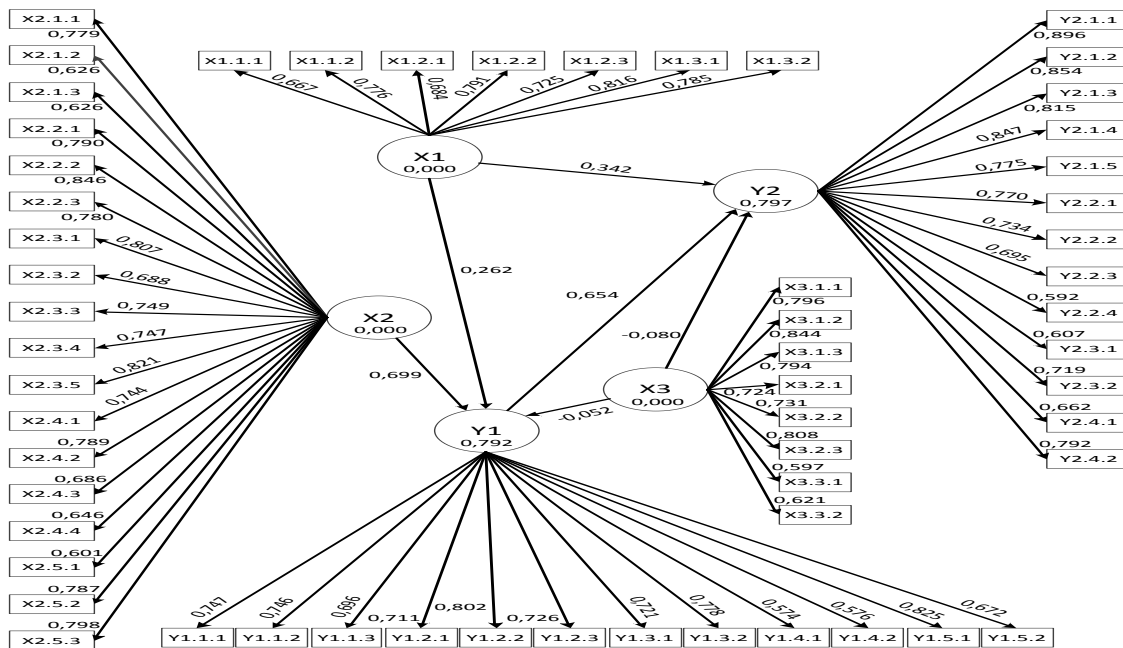
HASIL

Hasil Evaluasi Penelitian

Selaras dengan tujuan dan spesifikasi penelitian, maka dilakukan tes dengan menggunakan software Smart PLS untuk mendapatkan hasil tes yang sesuai. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, diperlukan pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah seluruh konstruk penelitian dinyatakan valid dan reliabel, maka peneliti dapat melakukan pengujian hipotesis.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 yang menyajikan hubungan diantara masing-masing konstruk.



Gambar3.1 Model Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	T-statistic	Kesimpulan
H1	X1 → Y1	2,4771*	Didukung
H2	X1 → Y2	3,5376*	Didukung
H3	X2 → Y1	5,7642*	Didukung
H4	X3 → Y1	0,5775	Ditolak
H5	X3 → Y2	0,7296	Ditolak
H6	Y1 → Y2	8,7167*	Didukung

Sumber : Data yang diolah, *Signifikan pada alfa 1%

Keterangan: X1 = kapasitas sumber daya manusia; X2 = pengendalian intern; X3 = pemanfaatan teknologi informasi; Y1 = *corporate governance*; Y2 = informasi laporan keuangan

Uji signifikansi didapat melalui perbandingan *t-statistics* dengan *t-table*. Hipotesis yang dibangun dalam studi ini menggunakan pengujian hipotesis satu ekor (*one-tailed*). *T-table* hipotesis satu ekor untuk taraf signifikansi 5% adalah >1,645 dan >2,334 untuk taraf signifikansi 1%. Berdasarkan Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa **H1**, **H2**, **H3**, dan **H6** didukung, sedangkan **H4** dan **H5** ditolak. Berikut adalah uraian pengujian hipotesis setiap konstruk *corporate governance* dan informasi laporan keuangan.

Tabel 3.2 Total Effects

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Err or (STERR)	TStatistics (O/STERR)
X 1 -> Y1	0,2622	0,2666	0,1106	0,1106	2,3704
X 1 -> Y2	0,5129	0,4982	0,1053	0,1053	4,8693*
X2 -> Y1	0,6991	0,6717	0,124	0,124	5,6387
X3 -> Y1	-0,052	-0,0371	0,0908	0,0908	0,5722
X3 -> Y2	-0,1139	-0,0836	0,117	0,117	0,9737
Y1 -> Y2	0,6535	0,6465	0,0721	0,0721	9,0656*

Sumber : Data yang diolah, *Signifikan pada alfa 5%

Keterangan: X1 = kapasitas sumber daya manusia; X2 = pengendalian intern; X3 = pemanfaatan teknologi informasi; Y1 = *corporate governance*; Y2 = informasi laporan keuangan

Diskusi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap *Corporate Governance*

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H1 didukung dengan nilai koefisien positif. Hal ini berarti semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik penerapan *corporate governance*. Hasil studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek (2012). Manek (2012) melakukan studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tinggi dapat meningkatkan penerapan *corporate governance*.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan ketrampilan yang cukup dalam penerapan *corporate governance*. Dengan demikian, manajemen Perum Jasa tirta I dapat membekali karyawan dengan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan yang cukup agar karyawan dapat memiliki kemampuan terbaik dalam meningkatkan penerapan *corporate governance*. Ketika karyawan merasa memiliki kemampuan setelah mendapat bekal yang cukup dari proses pendidikan, pelatihan dan ketrampilan, mereka akan cenderung meningkatkan penerapan *corporate governance*.

Diskusi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Informasi Laporan Keuangan

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H2d didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik informasi laporan keuangan. Hasil studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek (2012). Manek (2012) melakukan studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan. Untuk mencapai informasi laporan keuangan yang sesuai realitas diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang tinggi.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa keandalan dan ketepatan waktu informasi laporan keuangan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kapasitas sumber daya yang tinggi. Dengan demikian, manajemen Perum Jasa Tirta I harus membekali karyawan dengan pelatihan yang cukup agar karyawan dapat memiliki kemampuan terbaik dalam menyusun laporan keuangan. Ketika sumber daya manusia merasa memiliki kemampuan yang cukup dari proses pelatihan, mereka akan cenderung menyusun laporan keuangan dengan andal dan tepat waktu.

Diskusi Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Corporate Governance

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H3 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengendalian intern, maka semakin baik pula penerapan *corporate governance*. Hasil studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek (2012). Manek (2012) melakukan studi pengaruh pengendalian intern terhadap penerapan *corporate governance* pada SKPD pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil studi menyimpulkan bahwa tingginya kepatuhan pengendalian intern dapat meningkatkan penerapan *corporate governance*.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa pengendalian internal yang dibangun dan ditaati oleh perusahaan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penerapan *corporate governance*. Dengan demikian, direksi, manajemen dan seluruh staf harus menerapkan pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan dalam menciptakan penerapan *corporate governance*.

Diskusi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap *Corporate Governance*

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H4 ditolak dengan koefisien positif. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance*. Hasil studi ini tidak konsisten dengan studi yang dilakukan Manek (2012), tetapi konsisten dengan studi yang dilakukan Sosiawan (2008) dan (Sari dan Winarno, 2012).

Bukti empiris tidak mendukung hipotesis 4 (H4) dalam studi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Perum Jasa Tirta I belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan dalam penerapan *corporate governance*. Hasil dalam studi ini diduga karena responden yang mayoritas berasal dari Divisi tidak memahami teknologi informasi yang erat kaitannya dengan peralatan dan software pendukung untuk penerapan *corporate governance*. Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H4 ditolak dengan koefisien positif. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance*.

Diskusi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Informasi Laporan Keuangan

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H5 ditolak dengan koefisien positif. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan. Bukti empiris ini tidak konsisten dengan studi yang dilakukan oleh (Widianingrum dan Rahmawati, 2010; Manek, 2012; Lismawati, 2012; Hullah *et al.* 2012, Sari dan Witono, 2014). Hasil studi ini konsisten dengan studi yang dilakukan (Prapto, 2010; Delano dan Deviani, 2013; Desmiyawati, 2014).

Bukti empiris tidak mendukung hipotesis 5 (H5) dalam studi ini diduga karena responden yang mayoritas berasal Divisi tidak memahami teknologi informasi yang erat kaitannya dengan peralatan dan software pendukung untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan pertama, keberadaan peralatan dan software pendukung penyusunan laporan keuangan perusahaan masih tersentralisasi di kantor pusat, software yang digunakan di divisi hanya sebatas penggunaan program excel untuk input data transaksi

manual. Kedua, keterbatasan kemampuan personil bagian administrasi keuangan di Divisi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan Divisi. Hal ini bisa menjadi masukan bagi manajemen Perum Jasa Tirta I agar mengakses peralatan dan software pendukung penyusunan laporan keuangan untuk diaplikasikan pada masing-masing Divisi, kemudian melakukan pembinaan dari bagian keuangan kantor pusat ke Divisi untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Dengan adanya keadaan seperti ini, maka responden penelitian ini tidak dapat ikut andil dalam peningkatan kualitas informasi laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Diskusi Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Informasi Laporan Keuangan

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H6 diterima dengan koefisien positif. Hal ini berarti semakin tinggi *corporate governance* maka semakin tinggi kualitas informasi laporan keuangan. Hasil studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek (2012). Manek (2012) melakukan studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* yang tinggi dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa penegakan prinsip *corporate governance* memiliki kecenderungan untuk meningkatkan pengungkapan informasi laporan keuangan. Dengan demikian, dalam penerapan *corporate governance* yaitu prinsip transparansi informasi laporan keuangan, harus dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I sesuai Keputusan Kementerian yang telah ditetapkan mengingat *stakeholder* yang memerlukan keterbukaan informasi terutama informasi laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan diskusi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern dapat meningkatkan penerapan *corporate governance* dan informasi laporan keuangan.
2. Kapasitas sumber daya manusia memengaruhi *corporate governance* dikarenakan semakin baik kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, maka dapat mendorong penerapan *corporate governance*, sehingga informasi laporan keuangan meningkat.
3. Pengendalian intern memengaruhi *corporate governance* dikarenakan semakin kuatnya pengendalian intern yang telah dibuat dan diterapkan perusahaan, maka akan semakin

- tercapai penerapan *corporate governance*, dan pada akhirnya akan membawa dampak yang jauh lebih baik pada informasi laporan keuangan yang disampaikan pada *stakeholder*.
4. Studi ini tidak berhasil untuk membuktikan bahwa *corporate governance* dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
 5. Studi ini juga tidak berhasil untuk membuktikan bahwa informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
 6. Dalam studi ini, *corporate governance* memiliki pengaruh terbesar dalam model penelitian. *Corporate governance* berpengaruh pada informasi laporan keuangan, karena dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka laporan keuangan yang berkualitas dapat diterbitkan oleh perusahaan

Tidak ada penelitian yang sempurna karena penelitian bersifat saling melengkapi dan terus berkelanjutan untuk terus melengkapi keterbatasan dari studi sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden berasal dari divisi tidak memahami teknologi informasi yang erat kaitannya dengan peralatan dan software pendukung penerapan *corporate governance* dan penyusunan laporan keuangan,
2. Wilayah penelitian hanya dilakukan di dua wilayah sungai dari lima wilayah sungai yang dikelola Perum Jasa Tirta I yaitu pada Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimbudiono, R.S. dan Fidelis A.A, 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada masyarakat : Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05, No. 2. Hal. 18-30.
- Azlim, Darwanis., Usman, AB., 2012. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, no. 1, pp.1-14, Agustus 2012.
- Dewi K.A.P, Adiputra, Atmadja. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Tindakan Supervisi, Budaya Organisasi dan Kepribadian terhadap Informasi Laporan Keuangan (Studi pada PDAM Kabupaten Buleleng). *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014.
- Desmiyati, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, April 2014 : 163-178 .
- Diana, A. dan Setiawati, L. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi : Perancangan, Proses, dan Penerapan*. Andi. Yogyakarta.
- Hendra, W., Darwanis., Usman, B., 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Propinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, no. 1, pp.43-58,

- Agustus 2012.
- Hullah, R.H., Sifrid, P., Steven, T., Novi, B. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Unsrat*. Vol. 3 No. 2 Desember 2012.
- Irawan, P. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. STIE LAN Press, Jakarta
- Jensen, M., and W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structur. *Jurnal of Economics*. Vol.3, No.4 p.305-360
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, hal 1-9
- Lismawati, 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)*. Vol.4 No.4 Juli-Desember 2012. Hal. 23-31
- Manek, Aquidos. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Intervening Variabel (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Morris, Richard D. 1987. Signaling, Agency Theory and Accounting Policy Choice, *Accounting and Business Research*, 18.69 : 47-56
- Prpto, Susilo. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen). *Tesis*, Program Studi Magister akuntansi Universitas Sebelas Maret.
- Sari S.P. dan Witono B. 2014. Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah ditinjau dari SDM, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014)*. Research Methods and Organizational Studies. Hlm. 418-425.
- Sosiawan E.A. 2008. Tantangan dan Hambatan Penerapan *E-Government* di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika*. 24 Mei 2008
- Widianingrum C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi empiris di pemda Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi VIII Purwokerto*, 2010.
- Wilkinson, JW., Cerullo, M.J., Raval, V., and Wong, B., Wing, O. 2000. *Accounting Information Systems : Essential Concepts and Applications*. Four Edition. John Wiley and Sons. Inc.